

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, 2011 *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*.
Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Arinanto Satya, 2012; *Memahami Hukum, Dari Konstruksi sampai Implementasi* PT RajaGrafindo Persada; Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2010 *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum*,
(Bandung: Mandar Maju,

_____ 2004, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*,: Refika Aditama. Bandung

Asshiddiqie, Jimly 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia BIP* Kelompok Gramedia. Jakarta

_____ 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:
Konstitusi Press,

_____ 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika,

A.V. Dicey, 1959 *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan,

Bivitri Susanti, 2019 “Implikasi Revisi UU KPK terhadap Independensi KPK”,

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta:

Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001*

Hakim, Abdul Aziz 2011 *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*.
Yogyakarta

HM Ali Mansyur 2012, *Dalam Memahami Hukum dari konstruksi sampai implementasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Pustaka Pelajar.

Indrayana, Denny ,2016, *Jangan Bunuh KPK*,: Cita Intrans Selaras.
Malang

Islamy M. Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,

Kurnia, Titon Slamet, 2020, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*,
Jurnal Konstitusi, Volum 17, Nomor 1, Maret

Marzuki, Peter Mahmud 2016.. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
Prenada Media,

MD, Moh Mahfud, , 2004, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*,
Rineka Cipta, Jakarta

_____2011 *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta,

_____2010 *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*,
Rajawali Pers Jakarta, ,

Montesquieu, 1989 *The Spirit of the Laws*, Cambridge University Press,

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*,: Rajagrafindo Persada Depok

_____2020 “Politik Hukum Pemberantasan Korupsi”, Rajagrafindo
Persada Depok

- Muin Fahmal, 2008 *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*,: Total Media, Yogyakarta
- Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta:
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kecana. Jakarta:
- Rahardjo Satjipto, 2009 *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta Kompas,
- Robert A. Dahl; 2001; *Perihal Demokrasi*; Yayasan Obor Indonesia; Jakarta
- Satria Buana Mirza; 2023 *Perbandingan hukum tata negara*, Sinar Grafika Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001* Jakarta,
- Silalahi Amin 2005 *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Batavia Press, Surabaya:
- Soehino, 1998 *Ilmu Negara*,: Liberty, Yogyakarta
- _____, 2006 *Hukum Tata Negara: Pokok-Pokok Pemikiran*. Liberty Yogyakarta:
- Soeroso R ; 2007 ; *Pengantar Ilmu Hukum* ; Sinar Grafika ; Jakarta.
- Subekti Valina Singka. 2018. *Menyusun Konstitusi Transisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Stahl, Friedrich Julius 1987 *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Reclam,
- Strong, C.F. 1973. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick and Jackson,
- Thoha Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Prenadamedia Group. Jakarta:

Titik Triwulan Tutik, 2024 *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2024 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Prestasi Pustaka,

Valina Singka Subekti. 2018. *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Asis, Muhammad. "The Legal Position of the KPK as an Independent Anti-Corruption Agency in Indonesia: A Review in Law No. 19 of 2019 and UNCAC." *Unnes Law Journal*, Vol. 6, No. 2 (2020).

Bira, Yohanes & Udju, Hendrik. "Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasi terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Mochtar, Arief. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4 (2020).

Wahyuningrum, Desy; Disemadi, Hari Sutra; dan Putra Jaya, Indra. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Utama, Ardiansyah & Winstar, Edo. "Pergeseran Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rumpun

Kekuasaan Eksekutif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Jurnal Yustisi*, Vol. 10, No. 1 (2022).

Datla, Kirti and Richard L. Revesz, 2012, “Deconstructing Independent Agencies and Executive Agencies.” *Cornell Law. Review*. Vol. 98, : 769.

de Sousa, Louis 2010, “Anti-corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance”, *Crime, Law, and Social Change*, Vol 53, Issue 5

Gregory, Robert, 2015, “Political Independence, Operational Impartiality, And The Effectiveness Of Anti-Corruption Agencies,” *Asian Education and Development Studies*, vol. 4, No. 1, h.125-142

Kurnia, Titon Slamet, 2020, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*, *Jurnal Konstitusi*, Volum 17, Nomor 1, Maret

Meagher, Patrick, 2005, “Anti-Corruption Agencies: Rhetoric Versus reality”, *he Journal of Policy Reform*, Vol. 8 No.1, Maret,

Nesti, Giorgia, 2018, “Strengthening The Accountability Of Independent Regulatory Agencies: From Performance Back To Democracy.” *Comparative European Politics* Vol 16.3,

Riani Bakri and Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

Quah, John S.T. 2007, “Anti-Corruption Agencies In Four Asian Countries: A Comparative Analysis”, *International Public Managemen Review* Vol 8 issue

C. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan.

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197)

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945